

Laporan Notula

Multi-Stakeholder Forum I OGI Tahun 2024

Senin, 19 Februari 2024 | 13.00 – 16.00 WIB

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester II (B12) RAN OGI VII Tahun 2023-2024 dan update mengenai pelaksanaan gerakan keterbukaan pemerintah Indonesia, Setnas Open Government Indonesia menyelenggarakan Multi-Stakeholder Forum I Tahun 2024. Kegiatan Multi-stakeholder Forum I Tahun 2024 mengundang semua pemangku kepentingan RAN OGI VII dan memberikan ruang untuk mendiskusikan capaian Semester II RAN OGI VII serta tindak lanjut yang akan didorong untuk semester-semester berikutnya.

TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya rapat antara lain:

1. Membahas Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi implementasi capaian Semester I - Semester II RAN OGI VII Tahun 2023-2024
2. Meningkatkan diskusi antar Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk memperkuat proses ko-kreasi dalam mencapai Komitmen RAN OGI VII tahun 2023-2024

PEMBAHASAN

Pengantar

1. **Bogat Widyatmoko** selaku Deputy bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - Pada semester II, terdapat 10 komitmen dengan capaian baik, 2 komitmen dengan capaian cukup, 2 komitmen dengan capaian kurang, dan 1 komitmen dengan capaian N/A. Terdapat penurunan capaian dari semester I.
 - Terdapat tiga catatan pelaksanaan utama dari hasil monev: 1) masih lemahnya ko-kreasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pencapaian target; 2) rendahnya komitmen para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pergantian penanggung jawab komitmen hingga tidak adanya *political will* yang cukup; 3) hambatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.
 - Pada 6-7 September 2023, Delegasi RI berperan aktif dalam OGP Global Summit di Tallinn, Estonia. Pemerintah Indonesia mengirimkan 34 delegasi yang terdiri dari 17 perwakilan Pemerintah dan 17 perwakilan OMS. Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga memenangkan penghargaan OGP Awards melalui komitmen Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan.
 - Peran aktif Indonesia juga terlihat pada pendaftaran OGP Local 2024. Terdapat 19 Pemerintah Daerah dari Indonesia yang mendaftar.
2. **Yanuar Nugroho** selaku OGP Envoy menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - Ko-kreasi perlu semakin ditingkatkan, karena terjadi penurunan. Komitmen pelaksana juga masih kurang
 - Open governance adalah modalitas untuk mencapai SDGs. Di Aspac sendiri, pencapaian SDGs tertinggal 35 tahun; severely off-track.
 - Indonesia negara upper-middle country dengan capaian terbaik: 62% tercapai, 13% akan tercapai. Namun, bila ada yang tertinggal, semua akan tertinggal.

3. **Maharani Wibowo** selaku Point of Contact OGI menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - Capaian administratif B12 K/L: 72% (28 target capaian) mendapatkan capaian baik, 26% (11 target capaian) mendapatkan nilai kurang, dan 2% (1 target capaian) mendapatkan nilai N/A.
 - Capaian administratif B12 OMS: 79% (27 target capaian) mendapatkan capaian baik, 18% (6 target capaian) mendapatkan nilai kurang, dan 3% (1 target capaian) mendapatkan nilai N/A.
 - Capaian ko-kreasi B12 K/L: 59% (23 Target Capaian) dilaksanakan dengan ko-kreasi aktif; 3% (1 Target Capaian) memiliki pelaksanaan ko-kreasi semi-aktif; 36% (14 Target Capaian) memiliki pelaksanaan ko-kreasi yang masih pasif; dan 2% (1 Target Capaian) mendapatkan penilaian N/A karena penilaian tidak dapat dilakukan terhadap pelaksana Target Capaian tersebut.
 - Capaian ko-kreasi B12 OMS: 56% (19 Target Capaian) dilaksanakan dengan ko-kreasi aktif; 9% (3 Target Capaian) dilaksanakan dengan ko-kreasi semi-aktif; 32% (11 Target Capaian) memiliki pelaksanaan ko-kreasi yang masih pasif dan 3% (1 Target Capaian) mendapatkan penilaian N/A karena penilaian tidak dapat dilakukan terhadap pelaksana Target Capaian tersebut.
 - Setnas OGI menyediakan waktu 7 hari untuk menyampaikan sanggahan nilai.

Sesi Diskusi: Hasil Capaian B12 dan Masukan Lainnya

4. **Bona Tua** selaku Senior Program Officer SDGs INFID mengajukan pertanyaan:
 - Apa tindak lanjut dari MSF ini, dan apa yang akan dilakukan dengan laporan Monev B12? Apakah akan dibagikan dengan publik?
 - Bagaimana dengan update dasar hukum OGI?
 - Apa rencana tindak lanjut untuk semester B18 dan B24?
5. **Maharani Wibowo** menyampaikan tanggapan:
 - Setnas OGI akan menyediakan waktu sanggah 7 hari. Setelah itu, Setnas OGI akan memperbaiki laporan Monev dan disampaikan kepada Menteri PPN serta anggota MSF terkait.
 - Dasar hukum: sudah berproses, dalam waktu dekat akan mengundang Sekber untuk rapat termasuk untuk roadmap.
6. **Yanuar Nugroho** menyampaikan tanggapan mengenai transisi kepemimpinan: harus bisa membuktikan bahwa OGI dapat membantu akselerasi pencapaian pembangunan. Beberapa contoh konkret seperti kepercayaan dunia internasional bagi Indonesia untuk menjadi co-chair vaksin covax pada 2021; award yang dimenangkan BPHN dan OMS akses terhadap keadilan pada tahun 2023. Capaian local government juga penting disorot. Setnas OGI bisa buat brief singkat untuk menghadap ke presiden baru: hal yang telah dicapai dan hal yang bisa dilanjutkan.

Komitmen 3

7. **Hilman Afif** selaku campaigner dari Auriga menyampaikan tanggapan: Sudah ada hearing dengan Ketua Komnas HAM namun tidak ada kepastian mengenai komitmen ini. Pasca hearing, baru terjadi pertemuan informal dengan staf Komnas HAM
8. **Mariah Agnes** dari Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tanggapan: Sudah ada PIC yang ditugaskan dari Komnas HAM menurut koordinasi dengan Biroren, namun akan ditindaklanjuti lagi terutama untuk permohonan data untuk penyusunan kajian
9. **Tanti Dian Ruhama** selaku Koordinator Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tanggapan: Unit kerja terkaitnya harus dipastikan untuk penyediaan data terkait, namun seharusnya data-data tersebut diunggah per tahun.
10. **Hilman Afif** menyampaikan tanggapan:

- Ibu Ketua meminta bagian kerjasama Komnas HAM untuk telusuri gimana awalnya Komnas HAM terlibat di rencana aksi. Pasca hearing, Auriga sudah memberikan catatan dan notes tentang proses yang berlangsung. Diharapkan ada PIC dari Komnas HAM yang lebih jelas
- Data 2022 belum tersedia dari bagian Pengaduan oleh Komnas HAM, sampai sekarang belum tersedia di website Komnas HAM.

Komitmen 4

11. **Ulfah Diah** selaku Analis Kebijakan dari Ditjen Aptika Kemenkominfo menyampaikan tanggapan:
 - Tahun 2023, sudah melakukan penyusunan RPP sebagai turunan UU PDP
 - Memang membutuhkan bantuan dari expert. Juga melibatkan akademisi dan praktisi mengenai UU PDP. Dari Yayasan TIFA, ada beberapa personil yang memahami isu ini, ada 2-3 expert yang dilibatkan dalam perumusan
 - Uji publik 2023 May-Juni, menyiapkan website untuk menampung masukan dari stakeholder. Di website juga rilis rancangan PP untuk diberikan masukan.
 - Proses penyusunan PP masih berjalan, masih ada proses pematangan substansi
12. **Theodorus Agustinus Hasiholan** dari Setnas OGI menyampaikan: Akan menyelenggarakan rapat dengan direktorat terkait dan juga Kominfo. Mohon bantuannya juga untuk dapat mengirimkan data dukung agar nilai capaian dapat diperbarui.
13. **Maharani Wibowo** menyampaikan masukan:
 - Alur mekanisme pembahasan di website, pelibatan publik baru di tahap penyampaian masukan publik, tapi kurang ada follow up jelas kepada pemberi tanggapan
 - Di Bappenas, peraturan yang sifatnya sensitif justru mengedepankan akuntabilitas, karena membutuhkan support dari masyarakat sipil.
 - Banyak concern mengenai UU PDP, baik itu dari segi data pribadi untuk penyandang disabilitas, dsb.
 - Kominfo diharapkan untuk tidak hanya mengundang narasumber, tapi juga bisa melibatkan perwakilan publik lebih luas; penjangkaran masukan publik.
14. **Yanuar Nugroho** menyampaikan masukan:
 - Perlu ada proses akuntabilitas. Setelah dilibatkan sekali, perlu dilibatkan kembali. Hal tersebut dilakukan oleh Bappenas saat menjangkarkan masukan untuk Musrenbang.
 - Apakah ada kemungkinan untuk ada keterlibatan lebih aktif dari KSP dan Bappenas untuk komitmen PDP?
 - Konsultasi publik sering dikritik terlalu mepet, tidak bermakna
15. **Ulfah Diah** menyampaikan tanggapan:
 - Sudah menerima sangat banyak masukan, perlu waktu untuk memilah
 - Kalau di tataran kebijakan nasional, tidak mudah melibatkan semua stakeholder secara penuh, apalagi ada beberapa hal yang masuk ranah pemerintah selaku regulator
 - Perlu ada rapat dengan OGI juga untuk membahas nanti bentuk laporannya sebaiknya bagaimana
16. **Rahma Utami** selaku Direktur Eksekutif Suarise menyampaikan pertanyaan untuk Ibu Ulfa: pasal 53 tentang perlindungan data bagi teman2 disabilitas, bagaimana update mengenai hal ini. Konsultasi publik dengan kelompok disabilitas sendiri bagaimana?
17. **Ulfah Diah** menyampaikan tanggapan:
 - Presiden akan membentuk lembaga pengawas PDP dan membuat guideline dari kepala lembaga yang bersifat lebih teknis.

- Dari narasumber-narasumber memang ada masukan termasuk untuk isu disabilitas, namun terlalu detail dan tidak masuk ke PP karena PP harusnya bersifat lebih general.

18. **Deborah Irene** selaku Project Manager dari Yayasan TIFA menyampaikan tanggapan:

- Di awal tahun TIFA dilibatkan dalam 2 Pokja untuk membantu penyusunan peraturan pemerintah. Namun, setelah konsultasi tersebut berlangsung tidak ada kabar sama sekali lagi dari Kominfo dan pada bulan Agustus salah satu anggota Pokja mempertanyakan apakah ada informasi bahwa ada kegiatan konsultasi publik di Bali, namun update ini didapatkan bukan dari Kominfo.
- Pasca acara Bali, dibuka portal untuk memberi masukan RPP. Pasca pembukaan portal tersebut, TIFA juga turut memberikan rekomendasi. Di awal Februari 2024, diadakan diskusi dengan beberapa perwakilan untuk membahas masukan portal lebih mendalam, dan TIFA tidak diundang pada acara tersebut meskipun TIFA dan Kominfo sudah bermitra melalui OGI.
- TIFA telah mengirimkan undangan kepada tim PDP kominfo untuk diskusi multipihak pasca MSF I Tahun 2024.

19. **Ulfah Diah** menyampaikan tanggapan:

- Kegiatan di Bali adalah forum nasional PDP, forum itu hanya *engagement* untuk berbagi pandangan dan pengalaman melaksanakan implementasi PDP. Forum konsultasi publik sejauh ini memang hanya di website PDIP
- Keterlibatan TIFA sudah dari awal di tahun 2023 untuk rumusan substansi, termasuk untuk pengendalian data pribadi yang Mba Deborah berikan masukan. Yang menjadi tantangan dari tim internal perumus adalah untuk mendalami masukan-masukan yang diberikan.

Komitmen 6

20. **Erfan** dari KPU menyampaikan: Sebenarnya berencana melakukan early meeting dengan Perludem, tapi tertunda sehingga belum sempat meeting dengan Perludem. Juga telah meminta Perludem mengirimkan surat secara resmi kepada KPU

Komitmen 11-13

21. **Arsa Ilmi Budiarti** selaku Knowledge Manager Indonesia Judicial Research Society menyampaikan tanggapan:

- Komitmen 11 UK 2: IJRS dan Kejaksaan sudah ada diskusi awal untuk melaksanakan UK 2 ini. Sebelumnya terkendala ada perubahan personil. Seharusnya setelah ini ke depan bisa didorong dengan dukungan dari AIPJ2, mulai dari penyusunan tools. Setelah tools tersedia, akan dilakukan Monev di Jawa Barat, Lombok, dan Jawa Timur.
- Komitmen 12 UK 1: memang perlu ada awareness lebih kepada OBH tentang Starlabankum. Mengajukan pelatihan lanjutan tentang Starlabankum dan Stopela. Sudah memiliki pedoman mengenai detail rinci Starla dan bagaimana OBH bisa mereplikasi untuk membuat Stopela mereka masing-masing.
- Komitmen 13, UK 1: Tindak lanjut dari hasil kajian yang telah dilakukan di tiga wilayah-> salah satu rekomendasinya adalah tindak lanjut dari kajian anggaran bankum yang lebih berperspektif kelompok rentan. Diskusi ini juga sempat sudah diikuti oleh Dit. Hukum dan Regulasi. Anggaran bankum sejak 2015 tidak pernah ada kenaikan. IJRS, PBHI, LBH APIK sudah masuk ke tim asesmen anggaran

22. **Rudi Pradisetia Sudirdja** selaku Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan dari Kejaksaan RI menyampaikan tanggapan:

- Pimpinan mengamanatkan Kejaksaan Agung secara penuh mendukung kegiatan OGI. Memang keterbukaan pemerintah dan kolaborasi dengan masyarakat sipil adalah hal penting

- Minggu lalu sudah berkoordinasi dengan IJRS untuk implementasi komitmen
23. **Maharani Wibowo** menyampaikan: untuk Komitmen 11 UK 3, Setnas OGI akan menyelenggarakan pertemuan forum bersama.
24. **Emma Rahmawati** selaku Kanit PPA Dittipidum Bareskrim Kepolisian RI menyampaikan:
- Kepolisian RI memang sedang dalam proses penyusunan peraturan dengan Pusham UII dan juga dengan OMS untuk penyandang disabilitas, dan perempuan berhadapan dengan hukum juga bisa diangkat. Harapannya memang bisa meningkatkan aksesibilitas dalam proses peradilan. Harapannya 2024 sudah selesai.
 - Mendukung ada forum bersama, karena memang proses peradilan ini akan saling menyambung mulai dari Polisi ke proses pengadilan; supaya selaras dengan APH lain
25. **Anggi S** dari Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan:
- UK 1: Kejaksaan catatannya baik. Karena ini in-line dengan ROPN Kejaksaan, Kumulasi akan ikut support pelaksanaan untuk UK ini
 - UK 2, Kumulasi akan berkoordinasi dengan Pak Rudi dari Panev. Kejaksaan sudah melakukan diklat terpadu mengenai gender, yang sesuai dengan ROPN Kejaksaan. Sepakat perlu ada monev untuk pedoman 1/2021
 - Sepakat perlu ada forum yang bersama-sama untuk UK 3

Komitmen 14

26. **Agus Wiryanto** selaku JF Dep. PHP dari KemenPPPA menyampaikan:
- Turunan ini adalah amanah. Saat ini sudah harmonisasi, dan sudah di paraf oleh K/L2 terkait, tersisa Kemenko PMK yang rencananya pada awal tahun 2024.
 - KemenPPPA sudah menyiapkan untuk membuat peraturan turunan perpres selanjutnya
27. **Rinto Siahaan** selaku Program Assistant SDGs dari INFID menyampaikan:
- 2022 waktu itu sudah audiensi dengan KemenPPPA, yang awalnya menyampaikan mereka tidak menerima update mengenai OGP. 2023, sulit menjangkau KemenPPPA. Ibu Vivi menghadiri kegiatan INFID di bulan Desember namun justru update yang disampaikan, fokus KemenPPPA saat ini ada di 4P
 - Sudah diundang ke forum KEMITRAAN namun belum mendapatkan update dari draf. Juga sudah berupaya kontak dengan Bu Ratna selaku Deputi terkait, karena memang diarahkan oleh Menteri PPPA, namun tidak ada update. Perlu ada kejelasan siapa yang menjadi direktorat/bagian terkait, karena INFID sering dialihkan.
 - Untuk DBK, sudah mendapatkan update dari LPSK per Agustus 2023.
28. **Maharani Wibowo** menyampaikan:
- Capaian dapat diubah pada masa sanggah menjadi tercapai atau 100%, namun ko-kreasi tetap akan mendapatkan nilai pasif
 - Karena PP sudah masuk PAK, next peraturan turunan berikutnya, harapannya masyarakat sipil terutama INFID bisa masuk dan terlibat, karena memiliki modalitas yang baik dan memiliki data dan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya.
29. **Junito Drias** selaku Manajer Advokasi dan Pelibatan External WVI menyampaikan:
- Pelibatan publik sebenarnya menurut WVI sudah terjadi, termasuk untuk peraturan turunan UPTD PPA. Mungkin kendalanya ada di komunikasi, dan sifat substansi yang memang lintas kedeputian. WVI masuk via jalur perlindungan khusus anak, bukan via deputi PHP. Hal ini bisa terlihat di ko-kreasi komitmen lain, di mana mungkin tidak semua bagian di sebuah K/L mengetahui tentang OGI dan perlu adanya ko-kreasi.

- WVI menilai sudah ada diseminasi draf ke publik, namun memang yang banyak diundang adalah masyarakat sipil yang bergerak di isu anak, namun masih ada beberapa yang juga bergerak di bidang perempuan. INFID memang mungkin tidak masuk ke dalam undangan dari OMS bidang perempuan.

30. **Agus Wiryanto** menyampaikan:

- Deputi PHP memang mengawal yang UPTD PPA. Dan juga sudah mengundang perwakilan masyarakat, sehingga akhirnya juga sudah harmonisasi. Awal tahun ini Perpres akan jadi, tapi kalau ada pembahasan untuk aturan lebih teknis nanti juga bisa mengundang INFID.
- Draft RPerpres juga bisa dishare, namun sudah diproses penandatanganan saat ini.

31. **Rinto Siahaan** menyampaikan:

- INFID malah sempat diminta ke deputi kesetaraan gender
- INFID sudah tergabung di FPL, dan masyarakat sipil dalam FPL juga menyampaikan adanya kesulitan untuk mendapatkan update mengenai peraturan turunan. Harapannya informan/kontak terkait di B18-B24 tidak mengalami perubahan.

32. **Bona Tua** menyampaikan:

- Peraturan turunan UU TPKS dan ko-kreasi sudah didorong dari awal 2022
- Bukan hanya isu komunikasi, juga isu koordinasi. Kedeputan di KemenPPPA leading sektornya ada beberapa substansi yang beririsan. Perlu ada PIC yang tetap.

Masukan Lainnya

33. **Aryanto** selaku Koordinator Nasional PWYP menyampaikan: Secara general, yang harus diperbaiki adalah how to strengthen co-creation. Dan sebenarnya Setnas OGI dapat memainkan peran lebih aktif dalam memfasilitasi koordinasi, dan juga memintakan update berkala dari pemangku kepentingan; Setnas OGI bisa memainkan peran bridging lebih aktif.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Secara keseluruhan, terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan semester sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh masih lemahnya ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, rendahnya komitmen para pemangku kepentingan, dan hambatan koordinasi dan komunikasi. Untuk periode berikutnya, perlu ada koordinasi lebih erat antar pemangku kepentingan, dan Setnas OGI perlu memainkan peran lebih besar dalam menjembatani pemangku kepentingan dan mengidentifikasi kemajuan maupun tantangan dari capaian komitmen.

Selain itu, Setnas OGI membuka masa sanggah untuk capaian komitmen selama tujuh hari setelah pelaksanaan MSF I Tahun 2024. Bila ada pemangku kepentingan yang ingin mengajukan sanggahan nilai, pemangku kepentingan dapat mengirimkan data dukung capaian terkait.

DOKUMENTASI

